

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.P. Parlindungan, *Pendaftaran tanah di Indonesia (Berdasarkan PP.24 Tahun 1997) dilengkapi Dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akte Tanah (P.P.37 Tahun 1998)*, CV. Mandar maju, Bandung, 1999, hal 70
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hlm 10
- Boedi Harsono, 2005, *Sengketa-Sengketa Tanah serta Penanggulangannya*, Jakarta, Djambatan, hlm 18
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Hlm. 24
- Dyara Radhite Oryza Fea, *Buku Pintar Mengurus Sertifikat Tanah dan Perizinannya*, Cet.1,
- Hamzah, Andi. *Hukum dan Keadilan: Suatu Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Hasan Wargakusumah, *Hukum Agraria I Buku Panduan Mahasiswa*, Cet.1, Jakarta: Gramedia
- Hlm. 34
- J. Andy Hartanto, 2014, *Hukum Pertanahan*, LaksBang Justitia, Surabaya, h.83.
- Murad, R. (2013). *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Alumni
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 35
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada. Media Group. Jakarta. Hlm 35
- Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan, “*Standar Operasional Procedure (SOP) Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*”, (Tangerang: Universitas Pelita Harapan, 2021), hal. 34
- Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan, “*Standar Operasional Procedure (SOP) Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*”, (Tangerang: Universitas Pelita Harapan, 2021), hal. 57-58
- Purwata gandasubrata, *Indonesia negara Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hal. 11
- Pustaka Utama, 1992. Hlm. 9-10
- Ronny Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 154
- Rusmadi Murad, “*Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*” Bandung : Alumni, 1999. Hlm. 22-23
- Salim, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Di Indonesia*. (Mataram, Pustaka Reka Cipta, 2012), 221
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), h. 121
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014)
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 19

- Sidharta Gautama, *Kepastian Hukum di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Cahaya, 2006), hlm. 85
- Soedharyo Soimin, *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Hlm.86
- Soedharyo Soimin, 1993, *Status Hak dan Pengadaan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020)
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 2
- Suhendra, *Analisa Terhadap Hak Keperdataan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.
- Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 65
- Yogyakarta : Buku Pintar 2016, Hlm.203

Jurnal

- Andi Tira, 'Legal Protection Of Holder Certificate Of Land Rights Through State Business Decisions', *Clavia : Journal Of Law*
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2015)
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Hlm 24
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003, hal. 205.
- Fataturun, I. D. (2016). *Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Fence M. Wantu, "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim", *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 3 Oktober 2007, hal. 193
- Hasan Wargakusumah, *Hukum Agraria I Buku Panduan Mahasiswa*, Cet. 1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992. Hlm. 9-10
- Marhel, J. (2017). Proses Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Masalah Masalah Hukum*, 249-256. doi:<https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.249-256>
- Mario Julyano dan Aditya Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1 Juli 2019, hal. 15
- Muhammad Yusrizal, 'Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum', *De Lega Lata*, 2.1 (2017)
- Nur Hayati, "Peralihan Hak dalam Jual Beli Hak Atas Tanah (Suatu Tinjauan Terhadap Perjanjian Jual Beli dalam Konsep Hukum Barat dan Hukum Adat dalam Kerangka Hukum Tanah Nasional)," *Lex Jurnalica* 13, No. 3 (2016): 288

- Perangin, E. (1994). *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, hal. 17
- Santoso, C. M. (2015). *PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA JUAL-BELI DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG*. Semarang: Prodi Ilmu Hukum UNIKA Soegijapranata. Retrieved from <http://repository.unika.ac.id/4635/>
- Setiono, “*Rule of Law*”, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), h.3
- Siti Halilah, Mhd. Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 4, II (Desember 2021), hlm. 60
- Suardi. (2005). *Hukum Agraria*. Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, hlm. 1
- Susanto, B. (2014). *Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997*. DIH: *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(20), 76-82. Retrieved from <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/359>. hal. 1

Peraturan Perundang-Undangan

- Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan
- Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan

Putusan

- Bdk. *Konsepsi dan Regulasi Perlindungan Hukum menurut Doktrin dan Peraturan Perundang-Undangan*
- Putusan MA RI No. 112 K/Sip/1955 dan No. 3447 K/Sip/1956
- Putusan MA RI No. 242 K/Sip/1958
- Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor Perkara 3/Pdt.G/2023/PN Ban
- Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor Perkara 3/Pdt.G/2023/PN Ban

Website/Internet

http://repository.uib.ac.id/1151/6/S_1451007_chapter3.pdf, hlm. 71

<https://dqqlab.id/kenali-4-perbedaan-data-sekunder-dan-data-primer-saat-melakukan-penelitian>

<https://dqqlab.id/kenali-4-perbedaan-data-sekunder-dan-data-primer-saat-melakukan-penelitian>

<https://www.google.com/url?q=https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/29170/16820&sa=D&source=docs&ust=1719484333243844&usg=AOvVaw0fx56jTALdWKIXttfYxEzb>

IDTesis, “Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif”,
<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, diakses
pada 25 Mei 2023

Kamus

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kamus Besar Bahasa
Indonesia Online, (Indonesia: Kemdikbud, 2016
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kepastian%20hukum>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kamus Besar Bahasa
Indonesia Online, (Indonesia: Kemdikbud, 2016
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kepastian%20hukum>